

**RENCANA KERJA TAHUNAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
(RENJA OPD 2023)**



**KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jln. DR. Cipto Mangunkusumo No.07 Selong Telp. (0376) 23669 Fax : (0376) 23669  
email : [disnakkeswanlotim@gmail.com](mailto:disnakkeswanlotim@gmail.com) Website : <http://nakeswan.lomboktimurkab.go.id/>

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
NOMOR : 954.800/1111.a/VI/Nakeswan/2022

**TENTANG**

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA-OPD)**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

---

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 telah ditetapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah;  
b. bahwa dengan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 – 2023;  
c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2023;.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  12. Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2006 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Timur 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur 2018 – 2023

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RENJA OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : RENJA OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 sebagai acuan dalam :
1. Menyusun rencana operasional pelaksanaan Program dan Kegiatan pada masing – masing bidang lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur tahun 2023;
  2. Melakukan evaluasi terhadap sejauhmana rencana program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur yang diakomodir dalam RKPD Kabupaten Lombok Timur dibandingkan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021;
  3. Evaluasi dan Pengendalian Program dan kegiatan agar mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
  4. Koordinasi Program dan Kegiatan antar sektor dan atau antar instansi Pemerintah Pusat dan Provinsi;
  5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong

Pada Tanggal : 15 Juni 2022

**Kepala Dinas Peternakan dan Keswan  
Kabupaten Lombok Timur**



**Ir. H. Masyhur, SP**  
**NIP. 19661231 199203 1 150**

**Tembusan : disampaikan Kepada Yth. :**

1. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 dapat terlaksana.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 secara umum memuat Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur; Rencana Program dan Rencana Kegiatan, Rancangan Pagu Anggaran Tahun 2023 dan Evaluasi kinerja tahun sebelumnya 2022 (n-1).

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 ini disusun sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan target-target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Diakui masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusunan rencana ini, oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan bagi perbaikan di masa mendatang.

Selong, 15 Juni 2022

Kepala Dinas Peternakan dan Keswan  
Kabupaten Lombok Timur



**Ir. H. Masyhur, SP**  
NIP. 19661231 199203 1 150

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
<b>BAB. I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB. II. EVALUASI PELAKSNAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (Tahun 2021) dan tahun berjalan .....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	25
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	27
<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	27
3.3. Program dan Kegiatan.....	29
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>39</b>



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Dalam Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 21 ayat (3) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Daerah tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Selanjutnya, bahwa salah satu dokumen perencanaan yaitu Dokumen RKPD mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa salah satu tahapan dalam penyusunan Dokumen RKPD

yaitu di dahului dengan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD dan penyusunan RENJA SKPD mengacu kepada Rancangan Awal Dokumen RKPD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2022 dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Daerah dan dalam rangka memenuhi kewajiban perencanaan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

29. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
30. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
31. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
32. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
33. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
34. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
35. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
36. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

37. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
38. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
39. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
40. Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
41. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
45. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
51. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2006 Nomor 11);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Timur 2005-2025;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur 2018 – 2023

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

*Maksud dari penyusunan Rencana Kerja* ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2021, reviu pelaksanaan program / kegiatan tahun 2022 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023.

*Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD* adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2023.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun Sistematika penyusunan RENJA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 secara garis besar sebagai berikut :

## BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu n-1 (Tahun 2020)
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

## BAB IV. PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 (tahun berjalan n-1)\* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

Tabel 1. Evaluasi Renja SKPD Tahun Lalu dan Realisasi tahun berjalan

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN LOMBOK TIMUR																																					
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR																																					
PERIODE PELAKSANAAN : JANUARI 2021 S.D. DESEMBER 2021																																					
No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra OPDpd Tmn 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPDsd Renja OPDTh 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPDTh 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPDTh 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Th 2021		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra OPDsd th 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPDsd Th 2023 (%)											
								K		Rp	K		Rp	K		Induk (Rp)	Perubahan (Rp)	I		II		III		IV		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp
					Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Induk (Rp)	Perubahan (Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11			12=8+9+10+11		12a=12/7x100%		13=(6+12)		14=13/5x100%		
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, perdagangan, pariwisata, BUMD Koperasi dan sumberdaya lainnya serta meningkatkan pendapatan daerah dan investasi	3	27	01	01				44.205.525.092				28.712.118.615	31.885.082.947	1.426.588.765	4.128.619.860	13.694.603.480	5.753.068.404	89	25.002.880.509	99,73	78,42	89	25.002.880.509	-	57											
		3	27	01									90	7.296.997.615	8.042.044.197	16	1.410.462.765	35	2.744.412.860	25	1.791.547.430	13	1.874.989.254	89	7.821.412.309	98,89	97,26	89	7.821.412.309	89	334						
		3	27	01	2.01				64.610.235			8	12.675.000	5.895.000	-	-	1	675.000	3	2.200.000	4	3.020.000	8	5.895.000	100,00	100,00	8	5.895.000	33	9							
		3	27	01	2.01	01			31.525.000			4	5.025.000	1.745.000	-	-	1	325.000	-	-	3	1.420.000	4	1.745.000	100,00	100,00	4	1.745.000	33	6							
		3	27	01	2.01	06			33.085.235			5	7.650.000	4.150.000	-	-	-	350.000	3	2.200.000	2	1.600.000	5	4.150.000	100,00	100,00	5	4.150.000	33	13							
		3	27	01	2.02				425.610.168			3	6.851.118.525	7.723.320.165	1	1.391.012.718	1	2.624.941.302	1	1.742.670.833	1	1.779.486.326	3	7.538.111.179	100,00	97,60	3	7.538.111.179	100	1.771							
		3	27	01	2.02	01			20.514.817.575			14	6.655.052.525	7.557.194.165	3	1.391.012.718	5	2.616.541.302	3	1.740.270.833	3	1.624.160.326	14	7.371.985.179	100,00	97,55	14	7.371.985.179	33	36							
		3	27	01	2.02	03			372.017.668			12	190.630.000	162.430.000	-	-	1	8.400.000	0	2.400.000	2	151.630.000	12	162.430.000	100,00	100,00	12	162.430.000	33	44							
		3	27	01	2.02	05			25.220.000			1	2.430.000	2.430.000	-	-	-	-	-	-	1	2.430.000	1	2.430.000	100,00	100,00	1	2.430.000	33	10							
		3	27	01	2.02	07			28.372.500			16	3.006.000	1.266.000	-	-	-	-	-	-	16	1.266.000	16	1.266.000	100,00	100,00	16	1.266.000	42	4							
		3	27	01	2.03				118.588.538			4	51.714.000	49.714.000	-	2.030.000	2	22.350.000	1	7.540.000	1	17.764.000	4	49.684.000	100,00	99,94	4	49.684.000	33	42							
		3	27	01	2.03	06			118.588.538			4	51.714.000	49.714.000	-	2.030.000	2	22.350.000	1	7.540.000	1	17.764.000	4	49.684.000	100,00	99,94	4	49.684.000	33	42							
		3	27	01	2.06				633.593.648			7	81.775.600	27.225.400	2	6.753.000	1	4.660.800	1	3.690.000	3	5.822.000	7	20.925.800	100,00	76,86	7	20.925.800	100	3							
		3	27	01	2.06	01			13.033.655			10	3.000.000	2.061.000	-	-	5	998.000	-	-	5	1.063.000	10	2.061.000	100,00	100,00	10	2.061.000	100	16							
		3	27	01	2.06	02			43.445.392			30	11.212.000	8.212.000	18	4.979.000	4	1.025.000	8	2.208.000	-	-	30	8.212.000	100,00	100,00	30	8.212.000	100	19							
		3	27	01	2.06	03			100.605.576			20	3.462.600	1.537.400	-	-	19	1.467.800	1	-	-	-	20	1.467.800	100,00	95,47	20	1.467.800	100	1							
		3	27	01	2.06	05			26.067.235			25.000	6.688.000	3.188.000	11.794	1.504.000	-	-	5.270	672.000	7.000	1.012.000	24.064	3.188.000	96,26	100,00	24.064	3.188.000	32	12							

1	2	3					4	5			6	7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		12=(12/7)x100%		13=(6+12)		14=(13/5)x100%			
		3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	Besp	825	12.512.273		275	1.800.000	1.800.000	41	270.000	41	270.000	124	810.000	41	270.000	248	1.620.000	90,00	90,00	248	1.620.000	30	13	
		3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SWPD	Jumlah perjalanan dinas	Kali	10	399.697.594		10	55.613.000	10.427.000	-	-	1	900.000	-	-	9	3.477.000	10	4.377.000	98,63	41,98	10	4.377.000	99	1	
		3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Uhit	30	292.350.399		10	68.495.000	45.881.142	-	-	-	-	-	-	10	45.855.000	10	45.855.000	99,94	99,94	10	45.855.000	33	16	
		3	27	01	2.07	06	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Paket	1	162.709.352		1	26.750.000	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-
		3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Uhit	15	129.641.047		5	41.745.000	45.881.142	-	-	-	-	-	-	5	45.855.000	5	45.855.000	99,94	99,94	5	45.855.000	33	35	
		3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Jasa penunjang Ususan pemerintah daerah	Kegiatan	4	233.233.773		4	62.780.000	52.880.000	1	7.927.798	1	8.793.843	1	12.071.178	1	15.384.278	4	44.177.097	87,82	83,54	4	44.177.097	88	19	
		3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar	Lembar	1400	8.689.079		370	2.000.000	2.000.000	102	550.000	-	-	102	550.000	167	900.000	370	2.000.000	100,00	100,00	370	2.000.000	26	23	
		3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah resi tagihan terbayar	Resi	1000	166.830.300		228	40.800.000	30.900.000	36	4.877.798	57	7.693.843	48	6.521.178	27	3.604.278	167	22.697.097	73,45	73,45	167	22.697.097	17	14	
		3	27	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah penyediaan jasa	kali	15	10.426.894		5	5.000.000	5.000.000	1	1.000.000	-	-	1	1.000.000	3	3.000.000	5	5.000.000	100,00	100,00	5	5.000.000	33	48	
		3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Urum Kantor	Intensitas Verifikasi Bansos	kali	90	47.287.500		20	14.980.000	14.980.000	2	1.500.000	1	1.100.000	-	4.000.000	17	7.880.000	20	14.480.000	100,00	96,66	20	14.480.000	22	31	
		3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah Asset pada Dines Peternakan yang berfungsi Optimal	Uhit	64	576.999.553		64	168.439.490	137.128.490	1	2.739.249	39	82.991.915	11	23.375.419	4	7.657.650	54	116.764.233	85,15	85,15	54	116.764.233	85	20	
		3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dines atau Kendaraan Dines Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan	Uhit	32	264.810.000		32	80.159.750	56.804.750	2	2.739.249	10	18.186.915	10	19.814.794	1	5.362.650	32	46.103.608	100,00	81,16	32	46.103.608	100	17	
		3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dines Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	Uhit	30	40.317.323		30	13.355.625	7.355.625	-	-	-	-	15	3.560.625	9	2.295.000	24	5.855.625	79,61	79,61	24	5.855.625	80	15	
		3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/kantor	Uhit	4	271.872.231		4	74.924.115	72.968.115	-	-	4	64.805.000	-	-	-	-	4	64.805.000	100,00	88,81	4	64.805.000	100	24	
		3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase rata - rata pertumbuhan populasi temak per Tahun	%	5	28.767.012.836		5	16.451.649.000	18.352.496.750	0	4.833.000	1	315.727.000	1	10.276.501.550	3	2.011.285.150	5	12.608.346.700	100,03	68,70	5	12.608.346.700	100	44	
		3	27	02	2.02		Pengadaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik Hewan yang dipelihara di Lombok Timur	jenis	10	23.739.156.945		10	15.436.004.000	16.314.022.450	-	2.293.000	2	286.977.000	6	9.325.461.700	2	1.253.254.000	10	10.867.985.700	100,00	66,62	10	10.867.985.700	100	46	
		3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit temak yang terdistribusi kepada masyarakat	Uhit	900	22.522.686.007		250	15.051.250.000	15.929.268.450	-	2.293.000	1	63.727.000	7	9.215.211.700	242	1.202.000.000	250	10.483.231.700	100,00	65,81	250	10.483.231.700	28	47	
		3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah kelahiran temak hasil Inseminasi Buatan (IBt)	Bkor	22500	1.216.470.938		7.000	384.754.000	384.754.000	-	-	4.062	223.250.000	2.006	110.250.000	932	51.254.000	7.000	384.754.000	100,00	100,00	7.000	384.754.000	31	32	



1	2	3				4	5		6	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		12a+12b/100%		13=(6+12)		14=13/5x100%					
		3	27	02	2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Temak dan Tanaman Pakan Temak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peternak yang menggunakan Teknologi Peternakan Tepat Guna	peternak	14000	178.995.010		12.000	44.200.000	44.200.000	-	-	5.226	19.250.000	1.751	6.450.000	5.023	16.500.000	12.000	42.200.000	100,00	95,48	12.000	42.200.000	86	24	
		3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Temak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah inseminator dan PMB yang terlatih dan terampil	Orang	15	178.995.010		5	44.200.000	44.200.000	-	-	2	19.250.000	2	6.450.000	1	16.500.000	5	42.200.000	100,00	95,48	5	42.200.000	33	24
		3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Temak, dan Hiauan Pakan Temak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyediaan pakan temak dan Registrasi temak	Kegiatan	2	4.848.860.881		2	971.445.000	1.994.274.300	-	2.540.000	1	9.500.000	1	944.589.850	-	741.531.150	2	1.698.161.000	100,00	85,15	2	1.698.161.000	100	35
		3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Temak dan Hiauan Pakan Temak	Jumlah produksi HPT, bahan pakan/pakan temak	Ton	150	4.728.750.000		100	943.915.000	1.964.744.300	-	-	-	48	941.249.850	52	733.381.150	100	1.674.631.000	100,00	85,15	100	1.674.631.000	67	35	
		3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Temak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Persentase kenaikan populasi temak Besar, Kecil dan Unggas	%	5	120.110.881		2	27.530.000	27.530.000	-	2.540.000	1,0	9.500.000	-	3.340.000	1	8150.000	2	23.530.000	100,00	85,47	2	23.530.000	40	20
		3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana peternakan per tahun	%	15	9.689.164.111		15	3.524.575.000	3.472.145.000	-	-	1	180.869.000	5	1.369.392.500	9	1.015.038.000	15	2.565.299.500	100,00	73,88	15	2.565.299.500	100	26
		3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Peternakan yang terbangun	Unit	15	9.689.164.111		12	3.524.575.000	3.472.145.000	-	-	1	180.869.000	5	1.369.392.500	7,00	1.015.038.000	13,00	2.565.299.500	108,33	73,88	13	2.565.299.500	87	26
		3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Prasarana dan Sarana RPH yang berfungsi optimal	Unit	6	1.103.375.000		2	75.000.000	75.000.000	-	-	2	75.000.000	-	-	-	-	2	75.000.000	100,00	100,00	2	75.000.000	33	7
		3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Peningkatan Jumlah dan kualitas prasarana peternakan	Unit	12	8.585.789.111		8	3.449.575.000	3.397.145.000	-	-	1	105.869.000	5	1.369.392.500	2	1.015.038.000	8	2.490.299.500	100,00	73,31	8	2.490.299.500	67	29
		3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dari PHM	persen	100	3.262.499.332		100	1.382.897.000	2.012.397.000	1	10.748.000	43	884.851.000	13	257.162.000	43	849.086.000	100	2.001.847.000	100,00	99,48	100	2.001.847.000	100	61
		3	27	04	2.01		Penilaian Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah penyakit hewan dan zoonosis per tahun	ekor	100	964.094.082		100	447.342.000	447.342.000	8	2.510.000	71	316.600.000	10	44.882.000	11	78.300.000	100	442.292.000	100,00	98,87	100	442.292.000	100	46
		3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah temak yang terobati dari serangan penyakit hewan dan zoonosis	Ekor	41000	964.094.082		12.500	447.342.000	447.342.000	70	2.510.000	8.847	316.600.000	1.254	44.882.000	2.188	78.300.000	12.500	442.292.000	100,00	98,87	12.500	442.292.000	30	46
		3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Intensitas pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran temak	Kali	167	236.437.500		52	76.787.000	74.787.000	9	217.000	25	36.850.000	8	11.270.000	10	24.800.000	52	73.137.000	100,00	97,79	52	73.137.000	31	31
		3	27	04	2.02	03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah temak yang diterbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) Lintas Kabupaten/Kota	Ekor	36000	236.437.500		10.000	76.787.000	74.787.000	29	217.000	4.927	36.850.000	1.508	11.270.000	3.536	24.800.000	10.000	73.137.000	100,00	97,79	10.000	73.137.000	28	31
		3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengambilan sampel per populasi	%	1	141.862.500		1	5.900.000	4.900.000	-	-	-	0	1.700.000	1	3.200.000	1	4.900.000	100,00	100,00	1	4.900.000	100	3	
		3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Sampel temak yang diuji	Sampel	500	78.812.500		500	5.900.000	4.900.000	-	-	-	-	173	1.700.000	327	3.200.000	500	4.900.000	100,00	100,00	500	4.900.000	100	6
		3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pelaku Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	orang	50	1.841.292.750		50	747.178.000	1.379.678.000	-	8.021.000	17	481.351.000	7	182.280.000	26	708.026.000	50	1.379.678.000	100,00	100,00	50	1.379.678.000	100	75
		3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah peserta yang mengakses Kredit Usaha Peternakan dan AU/TS	Orang	6000	1.746.355.874		5.000	715.408.000	1.372.908.000	27	7.386.000	1.751	480.786.000	632	182.210.000	2.590	702.526.000	5.000	1.372.908.000	100,00	100,00	5.000	1.372.908.000	83	79
		3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat Uluh dan Halal	%	100	94.936.877		100	31.770.000	6.770.000	9	635.000	8	565.000	1	70.000	81	5.500.000	100	6.770.000	100,00	100,00	100	6.770.000	100	7
		3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah pemotongan temak tercatat di RPH/TPH	ekor	36000	78.812.500		10.000	105.690.000	105.690.000	-	-	4.736	50.050.000	1.611	17.030.000	3.653	34.760.000	10.000	101.840.000	100,00	96,36	10.000	101.840.000	28	129
		3	27	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah jagal yang terampil dan terlatih di RPH/TPH	Orang	30	78.812.500		10	105.690.000	105.690.000	-	-	5	50.050.000	3	17.030.000	2	34.760.000	10	101.840.000	100,00	96,36	10	101.840.000	33	129



# Realisasi Tahun Berjalan 2022

## EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN LOMBOK TIMUR RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERIODE PELAKSANAAN : JANUARI 2022 S.D. MARET 2022

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra OPDpd Thn 2023 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPDsd Renja OPDTh 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPDTh 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPDTh 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Th 2022		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra OPDsd/td Th 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPDsd/td Th 2023 (%)					
					Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	(Rp)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					K		Rp.		K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
1	2		3	4	5			6		7		8				9		10		11		12=8+9+10+11		13=(6+12)		14=13/5x100%	
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, perdagangan, pariwisata, BUMD Koperasi dan sumberdaya lainnya serta meningkatkan pendapatan daerah dan investasi	3 27 01 2.01 01 2.01 06 2.02 01 2.02 03 2.02 05 2.02 07 2.03 06 2.06 01 2.06 02 2.06 03 2.06 05 2.06 06 2.06 09	LURUSAN PEMERINTAH ANBI DAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENJANGKUAN LURUSAN PEMERINTAH ANBI DAERAH KABUPATEN MOTTA	Persentase capaian Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	2.344.986.314	98,89	7.821.412.309	100	11.583.308.095	16	1.388.728.094					16	1.388.728.094	16,00	11,99	116	26.420.164.903	-	60	115	393
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Dok	24	64.610.235	100,00	5.895.000	8	13.178.000	-	-					-	-	-	-	100	5.895.000	417	9		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dok	12	31.525.000	100,00	1.745.000	4	5.222.000	-	-					-	-	-	-	100	1.745.000	833	6		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan kinerja	Lap	15	33.085.235	100,00	4.150.000	5	7.956.000	-	-					-	-	-	-	100	4.150.000	667	13		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan	Kegiatan	3	425.610.168	100,00	7.538.111.179	3	8.447.878.595	0	1.355.148.977					3	1.355.148.977	100,00	16,04	103	8.893.260.156	3.433	2.090		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	kali	42	20.514.817.575	100,00	7.371.985.179	14	8.196.981.755	2	1.330.108.977					14	1.330.108.977	100,00	16,23	114	8.702.094.156	271	42		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi	kali	36	372.017.668	100,00	162.430.000	12	245.243.840	1	25.040.000					12	25.040.000	100,00	10,21	112	187.470.000	311	50		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Lap	3	25.220.000	100,00	2.430.000	1	2.527.000	-	-					-	-	-	-	100	2.430.000	3.333	10		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester/eran SKPD	Jumlah Laporan	Lap	38	28.372.500	100,00	1.266.000	16	3.126.000	-	-					-	-	-	-	100	1.266.000	263	4		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (Asset)	Lap	12	118.588.538	100,00	49.684.000	4	51.033.000	-	1.437.500					-	1.437.500	-	2,82	100	51.121.500	833	43		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen BMD	Dok	12	118.588.538	100,00	49.684.000	4	51.033.000	-	1.437.500					-	1.437.500	-	2,82	100	51.121.500	833	43		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah realisasi kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kegiatan	7	633.593.648	100,00	20.925.800	7	68.231.250	2	11.195.850					2	11.195.850	28,57	16,41	102	32.121.650	1.457	5		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik	Jenis	10	13.033.635	100,00	2.061.000	10	3.125.000	3	1.072.000					3	1.072.000	34,30	34,30	103	3.133.000	1.034	24		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Jenis	30	43.445.392	100,00	8.212.000	30	16.871.250	11	6.166.950					11	6.166.950	36,55	36,55	111	14.378.950	370	33		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat kebersihan	Jenis	20	100.605.576	100,00	1.467.800	20	2.785.000	11	1.505.000					11	1.505.000	54,04	54,04	111	2.972.800	554	3		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Lembar	75000	26.067.235	94,26	3.188.000	25.000	6.056.000	9.007	2.181.900					9.007	2.181.900	36,03	36,03	9103	5.369.900	12	21		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	Besp	825	12.512.273	90,00	1.620.000	275	1.620.000	46	270.000					46	270.000	16,67	16,67	136	1.890.000	16	15		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	Kali	10	399.697.594	98,63	4.377.000	4	37.774.000	-	-					-	-	-	-	99	4.377.000	986	1		

1	2	3				4	5			6		7		8		9	10	11	12=8+9+10+11		12a=12/7x100%		13=(6+12)		14=(13/5)x100%			
		3	27	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Unit	30	292.350.399	99,94	45.855.000	10	65.300.000	0	2.800.000				0	2.800.000	4,29	4,29	100	48.655.000	335	17	
		3	27	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Paket	1	162.709.352	-	-	1	30.000.000	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	27	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	15	129.641.047	99,94	45.855.000	5	35.300.000	0	2.800.000				0	2.800.000	7,93	7,93	100	48.655.000	669	38	
		3	27	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Jasa penunjang Ususan pemerintah daerah	Kegiatan	4	233.233.773	87,82	44.177.097	4	50.559.000	1	8.403.718				1	8.403.718	16,62	16,62	88	52.580.815	2.212	23	
		3	27	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar	Lembar	1400	8.689.079	100,00	2.000.000	400	2.080.000	199	1.034.000				199	1.034.000	49,71	49,71	299	3.034.000	21	35	
		3	27	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah resi tagihan terbayar	Resi	1000	166.830.300	73,45	22.697.097	300	35.700.000	39	4.675.718				39	4.675.718	13,10	13,10	113	27.372.815	11	16	
		3	27	01	2.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa	Kali	15	10.426.894	100,00	5.000.000	5	5.200.000	1	1.300.000				1	1.300.000	25,00	25,00	101	6.300.000	675	60	
		3	27	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Intensitas Verifikasi Bansos	Kali	90	47.287.500	100,00	14.480.000	20	7.579.000	2	1.394.000				2	1.394.000	10,00	18,39	102	15.874.000	113	34	
		3	27	01	2.09	01 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset pada Dinas Peternakan yang berfungsi Optimal	Unit	64	576.999.553	85,15	116.764.233	64	2.887.128.250	0	9.742.049				0	9.742.049	0,34	0,34	85	126.506.282	133	22	
		3	27	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan	Unit	32	264.810.000	100,00	46.103.608	32	62.807.500	2	7.987.249				11	7.987.249	34,38	12,72	111	54.090.857	347	20	
		3	27	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	Unit	30	40.317.323	79,61	5.855.625	30	13.890.500	-	-				-	-	-	-	80	5.855.625	265	15	
		3	27	01	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/kantor	Unit	4	271.872.231	100,00	64.805.000	4	2.810.430.250	0	1.754.800				0	1.754.800	0,06	0,06	100	66.559.800	2.500	24	
		3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase rata - rata pertumbuhan populasi temak per Tahun	%	5	28.767.012.836	100,03	12.608.346.700	5	12.014.809.000	0	4.202.100				0	4.202.100	0,03	0,03	100	12.612.548.800	2.001	44	
		3	27	02	2.02	01 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik Hewan yang dipelihara di Lombok Timur	jenis	10	23.739.156.945	100,00	10.867.985.700	10	10.645.328.000	-	3.552.100				-	3.552.100	-	0,03	100	10.871.537.800	1.000	46	
		3	27	02	2.02	01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit temak yang terdistribusi kepada masyarakat	Unit	900	22.522.686.007	100,00	10.483.231.700	300	10.582.000.000	-	3.552.100				-	3.552.100	-	0,03	100	10.486.783.800	11	47	
		3	27	02	2.02	02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah kelahiran temak hasil Inseminasi Buatan (IBI)	Bkor	22500	1.216.470.938	100,00	384.754.000	7.500	63.328.000	-	-				-	-	-	-	100	384.754.000	0	32	
		3	27	02	2.03	01 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Temak dan Tanaman Pakan Temak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Petemak yang menggunakan Teknologi Peternakan Tepat Guna	petemak	14000	178.995.010	100,00	42.200.000	13.500	42.550.000	206	650.000				206	650.000	1,53	1,53	306	42.850.000	2	24	
		3	27	02	2.03	01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Temak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah inseminator dan P/B yang terlatih dan terampil	Orang	15	178.995.010	100,00	42.200.000	50	42.550.000	1	650.000				1	650.000	1,53	1,53	101	42.850.000	672	24	
		3	27	02	2.05	01 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Temak, dan Hijauan Pakan Temak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyediaan pakan temak dan Registrasi temak	Kegiatan	2	4.848.860.881	100,00	1.698.161.000	2	1.326.931.000	-	-				-	-	-	-	100	1.698.161.000	5.000	35	
		3	27	02	2.05	05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Temak dan Hijauan Pakan Temak	Jumlah produksi HPT, bahan pakan/pakan temak	Ton	150	4.728.750.000	100,00	1.674.631.000	150	1.299.600.000	-	-				-	-	-	-	100	1.674.631.000	67	35	
		3	27	02	2.05	06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Temak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Persentase kenaikan populasi temak Besar, Kecil dan Unggas	%	5	120.110.881	100,00	23.530.000	5	27.331.000	-	-				-	-	-	-	100	23.530.000	2.000	20	

1	2	3				4	5		6		7		8		9	10	11	12=8+9+10+11	12a=12/7x100%	13=(6+12)	14=13/5x100%					
	3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana peternakan per tahun	%	15	9.689.164.111	100,00	2.565.299.500	15	2.324.125.000	0	7.396.000			0	7,396.000	0,32	0,32	100	2.572.695.500	667	27	
	3	27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Peternakan yang terbangun	Unit	15	9.689.164.111	108,33	2.565.299.500	12	2.324.125.000	0	7.396.000			0,04	7,396.000	0,32	0,32	108	2.572.695.500	722	27	
	3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Prasarana dan Sarana RPH yang berfungsi optimal	Unit	6	1.103.375.000	100,00	75.000.000	2	839.125.000	0	5.200.000			0	5.200.000	0,62	0,62	100	80.200.000	1.667	7
	3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Peningkatan Jumlah dan kualitas prasarana peternakan	Unit	12	8.585.789.111	100,00	2.490.299.500	18	1.485.000.000	0	2.196.000			0	2.196.000	0,15	0,15	100	2.492.495.500	834	29
	3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dari PHM	persen	100	3.262.499.332	100,00	2.001.847.000	100	1.840.689.500	1	15.228.200			1	15.228.200	1,00	0,83	101	2.017.075.200	101	62	
	3	27	04	2.01	Peniaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah penyakit hewan dan zoonosis per tahun	ekor	100	964.094.082	100,00	442.292.000	100	422.277.600	8	3.102.000			8	3.102.000	8,00	0,73	108	445.394.000	108	46	
	3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah temak yang terobati dari serangan penyakit hewan dan zoonosis	Ekor	41000	964.094.082	100,00	442.292.000	13.500	422.277.600	99	3.102.000			240	3.102.000	1,78	0,73	340	445.394.000	1	46
	3	27	04	2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Intensitas pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran temak	Kali	167	236.437.500	100,00	73.137.000	52	70.486.600	9	1.100.700			9	1.100.700	17,31	1,56	109	74.237.700	65	31	
	3	27	04	2.02	03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah temak yang diterbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) Lintas Kabupaten/Kota	Ekor	36000	236.437.500	100,00	73.137.000	12.000	70.486.600	29	1.100.700			29	1.100.700	0,24	1,56	129	74.237.700	0	31
	3	27	04	2.03	Pengediaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengambilan sampel per populasi	%	1	141.862.500	100,00	4.900.000	1	500.000.000	0	2.000.000			0	2.000.000	0,40	0,40	100	6.900.000	10.000	5	
	3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Sampel temak yang diuji	Sampel	500	78.812.500	100,00	4.900.000	17	500.000.000	0	2.000.000			0	2.000.000	0,40	0,40	100	6.900.000	20	9
	3	27	04	2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pelaku Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	orang	50	1.841.292.750	100,00	1.379.678.000	21	747.697.300	-	7.668.300			-	7.668.300	-	1,03	100	1.387.346.300	200	75	
	3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah peserta yang mengakses Kredit Usaha Peternakan dan AUIS	Orang	6000	1.746.355.874	100,00	1.372.908.000	50	717.577.300	27	6.067.800			27	6.067.800	54,00	0,85	127	1.378.975.800	2	79
	3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat Utuh dan Halal	%	100	94.936.877	100,00	6.770.000	5.500	30.120.000	292	1.600.500			292	1.600.500	5,31	5,31	392	8.370.500	392	9
	3	27	04	2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah pemotongan temak tercatat di RPH/TPH	ekor	36000	78.812.500	100,00	101.840.000	100	100.228.000	-	1.357.200			-	1.357.200	-	1,35	100	103.197.200	0	131	
	3	27	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah jagal yang terampil dan terlatih di RPH/TPH	Orang	30	78.812.500	100,00	101.840.000	10.000	100.228.000	135	1.357.200			135	1.357.200	1,35	1,35	235	103.197.200	785	131
	3	27	06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Unit Usaha Hewan yang legal	Unit	24	141.862.500	100,00	5.975.000	10	10.000.000	2	1.730.000			2	1.730.000	20,00	17,30	102	7.705.000	425	5	
	3	27	06	2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Temak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Unit Usaha Hewan yang legal	Unit	24	141.862.500	100,00	5.975.000	22	10.000.000	2	1.730.000			2	1.730.000	9,09	17,30	102	7.705.000	425	5	
	3	27	06	2.02	01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Temak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Unit Usaha Hewan yang legal	kali	42	141.862.500	100,00	5.975.000	22	10.000.000	2	1.730.000			2	1.730.000	9,09	17,30	102	7.705.000	243	5
									-		-			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						JMLAH TOTAL			99,73	25.002.880.509		21.772.931.595	-	1.417.284.394	-	-	-	-	1.417.284.394	6,79	5,10	100	26.420.164.903	-	-	
																			6,79	5,10						
																			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Tersedianya Fasilitas Kerja, SDM dan Anggaran																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Koordinasi dalam peningkatan kinerja dan pelaporan kinerja masih kurang mendukung																										
Tindak lanjut diperlukan dalam trivulan berikutnya: Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan kinerja dan pelaporan kinerja																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Perjanjian Kerja berikutnya:																										

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian rencana kerja program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 telah sesuai dengan target kinerja bahkan rata – rata pecapaian fisik program dan kegiatan 99,73 % hal ini menunjukkan bahwa rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 telah sesuai dengan RENJA SKPD dan dapat merelalisasikan semua Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan telah dimasukkan kedalam Plafon Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2022.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

1. Terhadap Kinerja Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 – 2023 telah mengalami beberapa kemajuan penting, Sebagai gambaran sesuai dengan tabel 2.1. (terlampir) tentang Pencapaian Kinerja sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020, maka dapat diuraikan sebagai berikut : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 7 kegiatan yang menunjang pelaksanaan program utama pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur dengan sasaran utama adalah berfungsinya secara optimal sarana dan prasarana peternakan dan optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran mulai dari Penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan laporan kinerja bulanan, triwulan maupun tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.

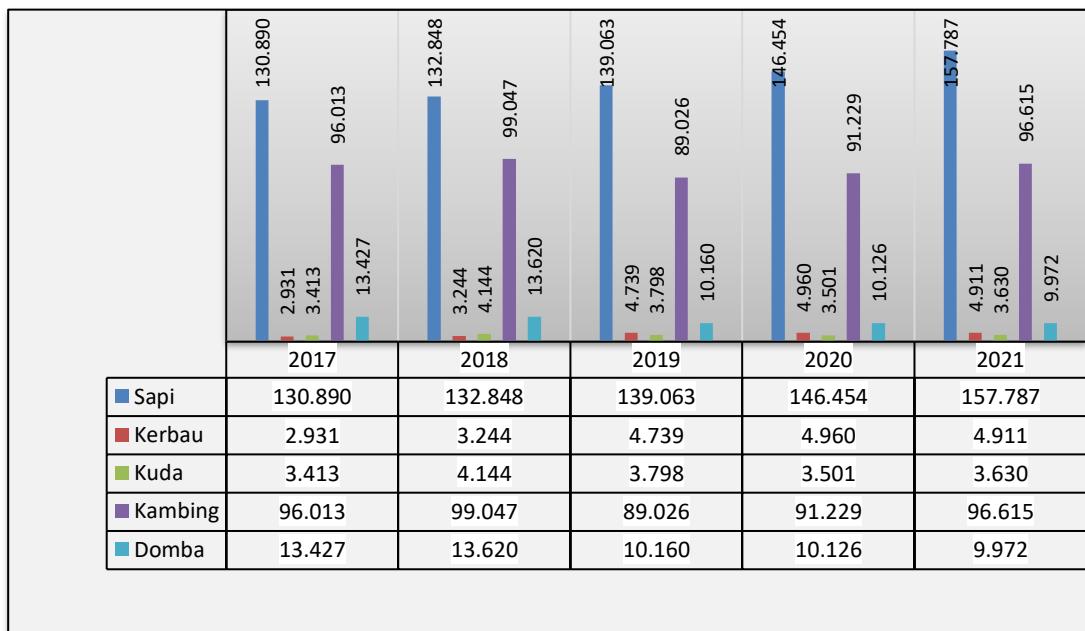
Secara umum program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan sangat mendukung dalam penyediaan layanan perkantoran dan penyediaan prasarana dan sarana perkantoran dengan capaian 89 % dari target 90 % tahun 2021. Tidak tercapainya target disebabkan karena adanya pengalihan anggaran kegiatan dalam rangka mengatasi covid 19 diawal tahun yaitu pada sub kegiatan Pengadaan Mebeuler kantor, Namun secara umum rata – rata pelaksanaan kegiatan penunjang baik dalam bentuk administrasi, pelayanan jasa kantor dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dapat berjalan lancar tanpa ada kendala dalam pelaksanaannya, bahkan realisasi secara fisik pada sub kegiatan rata – rata mencapai 98,89 %.

## 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian merupakan prioritas utama dalam mengemban misi peternakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 yaitu meningkatkan produksi komoditi peternakan unggulan daerah untuk menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal.

Sasaran utama program ini adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ternak yang direncanakan sebesar 5 % per tahun dengan barometer utama adalah peningkatan populasi ternak, terutama ternak sapi sebagai komoditi unggulan Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tertera dalam grafik berikut :

Garafik. 3.3. Pertumbuhan Populasi Ternak Sapi di Kabupaten Lombok Timur



Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan (2022)

Dari grafik di atas memberikan gambaran bahwa trend peningkatan populasi ternak Sapi dalam 3 tahun terakhir rata – rata berada diatas 5 % sebagaimana yang di targetkan dalam RPJMD dan Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur 2018 – 2023. Bila dibandingkan dengan rata – rata pertumbuhan populasi ternak sapi secara nasional periode 2016 – 2020 yaitu sebesar 2,23 %, maka hal ini merupakan indikator keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menjaga kelestarian sumber daya ternak dan produksi komoditi peternakan.

Dalam pelaksanaan program ini, ditargetkan anggaran sebesar Rp. 18.352.496.750,- untuk dua Sub Kegiatan dengan realiasi anggaran sebesar Rp. 12.608.346.700,- (68,70%) dan realisasi fisik program dan kegiatan mencapai 100 %. Pencapaian target peningkatan populasi ternak yang menjadi indikator program ini didorong oleh beberapa kegiatan antara lain :

- a. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini diarahkan untuk menjamin kemurnian dan kelestarian sumber daya genetik ternak yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Maka salah satu bentuk menjaga kelestarian sumber daya ternak adalah melalui kegiatan pendistribusian atau bantuan bibit ternak kepada masyarakat yang disesuaikan dengan spesifikasi dan karakteristik wilayahnya masing – masing.

Pada tahun 2021 ditargetkan terdistribusi bibit ternak sebanyak 250 Unit ternak dengan berbagai jenis ternak seperti Sapi Bibit, Sapi Bakalan, Sapi indukan Bali, Sapi Persilangan, Ternak Kambing, Ayam dan itik.

Realisasi Pelaksanaan kegiatan disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.3. Realisasi distribusi ternak tahun 2021**

No.	Jenis Ternak	Jumlah
		(ekor)
1	Sapi Bakalan	150
2.	Sapi Bibit	141
3.	Sapi Eksotik	200
4.	Sapi Indukan	154
	<b>JUMLAH</b>	<b>645</b>
5.	Kambing Batang	58
6.	Kambing Boer	44
7.	Kambing Kacang	41
8.	Kambing PE	48
	<b>JUMLAH</b>	<b>191</b>
9.	Ayam Petelur	44.865
10.	Ayam Pedaging	14.550
11.	Ayam Kampung Super	4.750
12.	Itik Petelur	2.592
	<b>JUMLAH</b>	<b>66.750</b>

Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan 2022



Selain Pejaminan kemurnian SDG ternak maka yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan. Kegiatan ini diselenggarakan dengan sasaran utama adalah peningkatan kelahiran ternak



melalui program prioritas nasional yaitu SIKOMANDAN (Sapi dan Kerbau Komoditi Andalan Negeri). Dalam mendukung program tersebut, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Lombok Timur mengadakan 5.000 Dosis straw Sapi persilangan sedangkan pemerintah pusat menyediakan N2 cair, straw Sapi Bali dan Sebagian Straw sapi persilangan yang ditargetkan sebanyak sebanyak 24.929 dosis.

Realiasi pelaksanaan fisik kegiatan ini telah mencapai 100 % dengan realiasi Inseminasi Buatan (IB) sebanyak 44.148 Dosis atau 147,5 % dan tingkat kelahiran ternak hasil IB sebanyak 25.986 ekor.

- b. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten

Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran bertambahnya mutu bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta Pakan konsentrat melauai peningkatan kualitas Pendidikan petugas pelayanan dan peningkatan kualitas Sumber daya peternak dengan target 12.000 orang akseptor IB. Realisasi kegiatan ini mencapai 38.530 akseptor IB dan 141 orang inseminator yang bersertifikat. Sebagaimana disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 3.4 Realiasi Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) pada Ternak Sapi di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021

Bulan	Akspetor	IB	PKb	Kelahiran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Januari</b>	4.481	4.845	1.916	2.475
<b>Februari</b>	4.767	5.425	1.550	2.228

<b>Maret</b>	3.587	4.096	2.067	2.077
<b>April</b>	3.243	3.565	2.740	2.149
<b>Mei</b>	3.855	4.276	3.369	2.558
<b>Juni</b>	4.464	4.982	2.981	2.695
<b>Juli</b>	3.364	3.663	1.899	2.943
<b>Agustus</b>	3.649	4.317	1.279	2.035
<b>September</b>	2.838	3.509	1.238	1.595
<b>Oktober</b>	1.853	2.323	682	613
<b>November</b>	1.448	1.875	794	4.001
<b>Desember</b>	981	1.272	450	617
<b>Total</b>	38.530	44.148	20.965	25.986

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2022

- c. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran utama kegiatan ini adalah terkendali dan terpantaunya Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dengan target tersedianya 100 ton pakan ternak konsentrat dan hijauan pakan ternak di masyarakat dalam rangka mendukung peningkatan produksi daging sesuai dengan sasaran utama rencana strategis Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.

Dalam pelaksanaannya telah direalisasikan pengadaan pakan ternak dalam rangka penyediaan dan pengendalian mutu pakan sebanyak 171,7 ton (171,7 %) pakan konsentrat dan bahan pakan berupa jagung.

### 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan prasarana peternakan dilapangan maka yang menjadi sasaran program ini adalah peningkatan kualitas parasarana peternakan baik prasarana perkandangan, prasarana perkantoran maupun prasarana budidaya peternakan dengan target 15 % per tahun.

Pada tahun 2021 ditargetkan pembangunan dan rehabilitasi perkandangan kelompok dan pasar ternak sebanyak 12 unit dengan anggaran program sebesar Rp. 3.524.575.000 ,- yang digunakan untuk pengadaan peralatan rumah potong hewan dan pembangunan kandang ternak dan perbaikan pasar hewan sebanyak 26 Unit (216,6 %) terdiri dari 16 unit kandang ayam, 2 unit peralatan kandang, 6 unit kandang



sapi, 1 unit kandang kambing dan 1 unit pasar ternak. Pelaksanaan kegiatan telah mencapai fisik 100 % dengan realisasi anggaran program dan kegiatan sebesar Rp. 2.565.299.500 (73,88 %). Prasarana yang dibangun tersebut telah difungsikan untuk budidaya ternak baik sapi, kambing maupun ayam.

Dengan terbangunnya kandang ini maka pembangunan prasarana peternakan tumbuh lebih dari 15 % atau 30 % dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 20 unit.

Masih rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena proses pelaksanaan fisik kegiatan yang dilakukan di perubahan anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang belum terbayarkan keuangannya.

#### **4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Sasaran pokok program ini adalah terkendalinya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang ditargetkan sebesar 100 %. Dalam pelaksanaannya ditunjang oleh 5 kegiatan pokok yang meliputi Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan

Masyarakat Veteriner dan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan.



Pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak yang merupakan salah satu pintu masuknya penyakit hewan menular strategis yang bersifat zoonosis (menular ke manusia) terutama dari daerah lain seperti Pulau Jawa, Bali maupun dari Pulau Sumbawa, dimana lalu lintas ternak ini intensitasnya sangat tinggi sehingga resiko penularan penyakit menjadi tinggi, maka salah satu bentuk pencegahannya adalah dengan melakukan pemeriksaan Kesehatan hewan di daerah perbatasan dengan memberikan rekomendasi status kesehatan hewan baik yang masuk maupun yang keluar Kabupaten Lombok Timur.

Program ini bertujuan untuk mengendalikan dan mencegah berkembangnya berbagai penyakit menular (Zoonosis) pada ternak yang dapat mengganggu kesehatan ternak dan masyarakat veteriner, dalam bentuk pelayanan aktif, pelayanan semi aktif dan pelayanan pasif dengan target out put yang dihasilkan adalah terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dari Penyakit Hewan Menular.

Indikator utama program ini adalah terjaminnya 100% kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dari penyakit hewan menular yang strategis atau bersifat zoonosis (menular ke manusia) di Kabupaten Lombok Timur. Dalam tahun 2021 Kabupaten Lombok Timur masih bebas dari penyakit menular strategis seperti Anthrax, Brucellosis, Rabies dan Penyakit Ngorok (SE).

Pada tahun 2021 terjadi pemasukan ternak Sapi, Kerbau dan Kuda dari Pulau Sumbawa sebanyak 13.000 ekor dengan tujuan sebagai ternak potong di Kabupaten Lombok Timur. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan terhadap pemasukan tetapi dilakukan di Rumah Potong Hewan baik yang dikuasai oleh Pemerintah maupun tempat pemotongan hewan yang dikuasai oleh swasta.



Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak dilaksanakan melalui sub kegiatan (1) *Pengendalian dan penanggulangan penyakit menular ternak atau zoonosis* dengan output kegiatan Jumlah ternak yang terobati dari serangan penyakit hewan dan zoonosis sebanyak 12.000 ekor, penyediaan obat – obatan ternak,

eliminasi anjing liar, pemeriksaan biosecurity pada beberapa sampel hewan carier; (2) Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan out put yang dihasilkan berupa Jumlah ternak yang diterbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) Lintas Kabupaten/Kota sebanyak 10.000 ekor dan teraliasi sebanyak 13.000 ekor (130 %) (3) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan berupa Pembinaan para jagal aktif dengan target sebanyak 10 orang dan pemeriksaan hewan kurban baik pemeriksaan ante mortem maupun post mortem, monitoring dan pengawasan peredaran daging di RPH dan pasar umum.



Kegiatan lain yang mencakup program ini adalah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan dengan out put sub kegiatan berupa Jumlah peserta yang mengakses Kredit Usaha Peternakan dan AUTS yang ditargetkan sebanyak 5.000 orang dan teraliasi sebanyak 5.300 orang atau 106 %.

Untuk mengatasi dampak pandemik covid-19, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menempuh kebijakan yaitu memberikan Subsidi bunga pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Asuransi Ternak Sapi kepada peternak dalam dua tahun terakhir sehingga masyarakat terbebas dari angsuran bunga bank. Melalui program yang diberi nama Program Lotim Berkembang Kabupaten Lombok Timur mendapat penghargaan dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

(TPAKD) Pusat sebagai Kabupaten terbaik dalam Inovasi Program Pengembangan Akses Keuangan di Sub Sektor Peternakan.

Anggaran Program ini bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Timur (DAU) sebesar Rp. 2.012.397.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 2.001.847.000,- (99,48 %) dimana Realisasi fisik program dan kegiatan telah mencapai 100 %.

**Outcome dari kegiatan** ini adalah tersedianya sarana dan prasarana puskesmas, obat – obatan ternak yang dibutuhkan oleh masyarakat selama 1 tahun dan terpeliharanya Kabupaten Lombok Timur dari ancaman Penyakit Hewan menular (zoonosis); terciptanya keamanan pangan asal hewan yang ASUH (aman sehat utuh dan halal). Sampai dengan Desember tahun 2021 Pelayanan Kesehatan Hewan telah mencapai 25.981 ekor baik ternak besar, ternak kecil, Hewan kesayangan dan unggas dari target 12.000 ekor, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.5. Realisasi Pelayanan Kesehatan Ternak di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021

Bulan	Ternak Besar (ekor)	Ternak Kecil (ekor)	Unggas (Ekor)	Hewan Kesayangan (ekor)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	1.415	411	11	66
Februari	1.336	394	43	67
Maret	1.927	355	11	90
April	1.855	380	4	61
Mei	1.940	385	6	79
Juni	1.930	494	2	55
Juli	1.447	304	5	43
Agustus	1.689	306	0	65
September	2.650	249	426	55
Oktober	1.282	323	10	23
November	1.316	289	207	24
Desember	1.370	276	2	37
<b>Lombok Timur</b>	<b>20.157</b>	<b>4.166</b>	<b>727</b>	<b>665</b>
2020	17.319	4.417	4.228	1.326
2019	10.688	5.150	234	285
2018	9.328	7.168	348	135
2017	9.201	7.940	384	273
2016	7.612	5.469	293	39
2015	9.847	5.962	290	187

Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan, 2022



## 5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengurusan ijin usaha di bidang peternakan seperti Rekomendasi ijin Usaha Pemotongan Hewan, Rekomendasi Ijin Usaha Pemeliharaan Ternak, Pembangunan Kandang, Perusahaan Peternakan dan lain – lain.

Indikator utama program ini adalah ketersediaan Jumlah Unit usaha Peternakan yang legal yaitu sebanyak 22 Unit Usaha yang melakukan pengurusan ijin maupun perpanjangan ijin tahun 2021. Dinas Peternakan dan Kesehatan dalam hal hanya mengeluarkan rekomendasi sedangkan yang membuat atau menerbitkan perijinan dibawah Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

Pada tahun 2021 jumlah perusahaan peternakan yang melakukan pengurusan ijin dan rekomendasi sebagai berikut :

Tabel 3.6. Jumlah usaha pemotongan ternak yang mengurus rekomendasi tahun 2021

NO.	TEMPAT PEMOTONGAN (RPH/TPH)	NAMA JAGAL		KETERANGAN
1	RPH PANCOR	1	H. HERMAN	Aktif
		2	Hj. SALMIATUN	Aktif
		3	M. GAZALI	Aktif
		4	ABDUL RAUFUDIN	Aktif
2	RPH MASBAGIK	1	SARWANI	Aktif
		2	HARYATI	Aktif
		3	H. SUHIRMAN	Aktif
		4	H. ASMAI	Aktif
		5	SABRI	Aktif
3	RPH ANJANI	1	H. MUIS SULSIDDIQ	Aktif
		2	MAMAN SASTRAWAN	Aktif
4	RPH AIKMEL	1	H. HASBULLAH	Aktif
		2	H. ABDUL LATIF	Aktif
		3	H. SUHAIMI	Aktif
		4	M. TAMIMI	Aktif
		5	H. M. ZAINI	Aktif
		5	Hj. HALIMAH	Aktif
5	RPH APITAIK	1	SUPARMAN	Aktif
		2	RACHMAN ROSYDI	Aktif
6	RPH KOTARAJA	1	H. DANDI	Aktif
7	RPH RUMBUK	1	MAHSUN	Aktif

8	TPH PERESAK	1	H. HAERUMAN ABDULLAH	Aktif
		2	ACHMAD FAIZAL	Aktif
		3	ANWAR SADAT	Aktif
		4	AGUS SUPIANDI	Aktif
9	TPH GUNUNG RAJAK	1	H. ALIMUDIN	Aktif
		2	H. AZWAR ANAS	Aktif
10	TPH SIKUR	1	SELAMET JUNIADI	Aktif
12	TPH GERES	1	SAHABUDIN	Aktif
13	TPH SURADADI	1	SULAIMAN	Aktif
		3	FATHURRAHMAN	Aktif
		4	RUSDI	Aktif
14	TPH RARANG	1	SURIATI	Aktif
15	TPH JENGGIK	1	BQ. SAIDAH	Aktif
16	TPH KORLEKO	1	Hj. ZULIANA HIDAYAT	Aktif
18	TPH PRINGGABAYA	2	DURAHMAN	Aktif
19	TPH KERUMUT	1	WIRONATA	Aktif
20	TPH SAMBELIA	1	ZAINUDDIN	Aktif
		2	ROHANI BINTI SA'IM	Aktif
21	TPH DASAN LEKONG	1	L. JUMAWALDI	Aktif
		2	Hj. RAHMAH	Aktif

Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan 2022

Pengurusan rekomendasi perpanjangan ijin jagal dari 54 usaha pemotongan ternak tahun 2021 yang masih aktif sebanyak 48 Usaha Pemotongan perorangan.

Selain pemberian rekomendasi kepada perusahaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur juga memberikan rekomendasi pengeluaran ternak ke Pulau Sumbawa baik dalam bentuk perusahaan maupun perorangan. Rekapitulasi pengeluaran ternak tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam table di bawah ini :

Tabel : 3.7 Jumlah ternak yang direkomendasi pengeluarannya ke Pulau Sumabawa tahun 2021

Nb	Bulan	Ayam Broiler	Ayam Afkir/ Broiler	Ayam Kampung	Ayam Merah	Ayam Bangkok	Itik	DCC	Burung	Kuda	Hewan Ksyngn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	Januari	100.900	-	-	-	2	-	810.000	10	0	0
2	Februari	72.600	-	2	500	-	-	836.600	11	-	0
3	Maret	78.800	-	-	-	-	-	20.000	-	-	1
4	April	79.300	-	-	-	6	400	370.000	-	1	-
5	Mei	121.900	-	3	-	6	-	350.000	-	5	0
6	Juni	78.800	-	-	-	1	-	460.000	-	9	0
7	Juli	101.100	-	-	-	-	400	360.000	-	0	0



8	Agustus	142.300	56.652	-	-	-	-	570.000	-	2	0
9	September	91.100	-	-	-	1	-	360.000	-	20	0
10	Oktober	70.200	-	-	-	1	-	400.000	-	25	0
11	November	71.500	-	-	-	1	-	1.330.000	-	13	0
12	Desember	85.000	-	15	-	-	-	80.000	-	0	0
	<b>Jml</b>	<b>1.093.500</b>	<b>56.652</b>	<b>20</b>	<b>500</b>	<b>18</b>	<b>800</b>	<b>5.946.600</b>	<b>21</b>	<b>75</b>	<b>1</b>

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2022

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan Hasil analisis terhadap kebutuhan dan penganggaran SKPD, maka terhadap Rancangan awal RKPD pada Program dan Kegiatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dalam rancangan awal RKPD telah diusulkan semua Program dan Kegiatan dengan total anggaran awal yang direncanakan sebesar Rp 31,055,025,040,-.. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka pembiayaan Program dan Kegiatan difokuskan pada usulan pembiayaan pada APBD Kabupaten Lombok Timur 2023
- b. Beberapa pertimbangan dalam menentukan Sumber pembiayaan Program dan Kegiatan antara lain (1) Apabila program dan kegiatan tersebut bersifat Nasional dan menjadi target pusat maka Rencana pembiayaannya diarahkan bersumber dari APBN seperti Pengembangan Kawasan, UPSUS SIWAB, dll; dan apabila kegiatan menjadi kewenangan provinsi sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 maka diarahkan ke Provinsi NTB.
- c. Untuk lebih rinci terhadap rancangan awal dan hasil analisis RKPD disajikan sebagaimana terlampir.

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan terhadap Usulan program dan Kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui 3 (tiga) model usulan yang diterima oleh SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur yaitu :

- Melalui Musrenbang yang dimulai dari tingkat Dusun, kemudian Desa, Kecamatan dan selanjutnya difinalkan pada Musrenbang Kabupaten.
- Melalui Musrebangtan yang dilakukan khusus oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan usulan masyarakat melalui Petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Tingkat Desa dan Kecamatan yang selanjutnya difinalkan di tingkat Kabupaten melalui Musrenbang Pertanian.
- Melalui Proposal – proposal yang diusulkan oleh Kelompok Tani baik bidang pertanian maupun bidang peternakan.

Usulan – usulan tersebut telah selaras dengan isu – isu penting yang berkembang di masyarakat maupun kebijakan secara Nasional seperti peningkatan Produksi, Produktivitas komoditi Peternakan, UPSUS SIWAB, Pengembangan kawasan dan Infrastruktur Prasarana dan Sarana Peternakan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat Visi, Misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahunan yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Isue Jangka Menengah dan Jangka Pendek dalam Pembangunan Nasional adalah Penguatan Ketahanan Pangan melalui Pencapaian Swasembada Khususnya Swasembada Daging 2034.

Hal tersebut telah sesuai dengan salah satu Misi Kepala Daerah yaitu Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.

#### **3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD**

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Periode 2018 – 2023, antara lain :

**Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :**

1. Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan mutu komoditi Peternakan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta daya saing komoditi peternakan;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparat Peternakan;

**Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :**

1. Meningkatkan Kuantitas Ternak.

2. Meningkatnya Kualitas Ternak.
3. Meningkatnya Daya saing komoditi peternakan.
4. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
5. Peningkatan Pemasaran Ternak;
6. Peningkatan pemasaran produk olahan hasil peternakan;
7. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Perkantoran;

### **3.3. Program dan Kegiatan**

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain :
  1. Program dan Kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan prioritas baik prioritas nasional maupun prioritas daerah, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi sinergisitas antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten.
  2. Program dan Kegiatan yang diusulkan mempunyai efek domino yang dapat mengungkit program dan kegiatan lain baik antar sub sektor maupun sektor lain.
  3. Program dan Kegiatan yang diusulkan merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat/petani dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi dan produktivitas ternak.
- b. Secara garis besar Program dan Kegiatan 2023 yang direncanakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut :

**FORMAT : MATRIK RENCANA KERJA TAHUNAN DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN BERDASARKAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023**

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM ( <i>out come</i> ) KEGIATAN ( <i>out put</i> )	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		
								2023		
								target (K)	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	
Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan mutu komoditi Peternakan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta daya saing komoditi peternakan	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
		3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAN			31.055.025.040	
		3	27	01		PROGRAM PENJUANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian Layanan Adminstrasi Perkantoran	100 Persen	<b>7.892.432.080</b>	
		3	27	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	8 Dokumen	<b>13.709.280</b>	
		3	27	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.435.040
		3	27	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	8.274.240
		3	27	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan	3 kegiatan	<b>7.410.169.520</b>	
		3	27	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	101 orang	7.198.104.160
		3	27	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12 Dokumen	206.185.200

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM ( <i>out come</i> ) KEGIATAN ( <i>out put</i> )	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN	
									2023	
									target (K)	(Rp.)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)
								Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
		3	27	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.628.080
		3	27		2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 laporan	3.251.040
		3	27	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (Asset)	4 Laporan	55.933.280
		3	27	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	55.933.280
		3	27	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah realiasi kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	7 Kegiatan	88.447.840
		3	27	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3.244.800
		3	27	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	12.126.400

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM ( <i>out come</i> ) KEGIATAN ( <i>out put</i> )	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN	
									2023	
									target (K)	(Rp.)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)
		3	27	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	3.745.040
		3	27	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	650 kotak	0
		3	27	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	150 Paket	7.233.200
		3	27	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	275 Dokumen	1.946.880
		3	27	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	60.150.480
		3	27	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	10 Uhit	74.083.360
		3	27	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Uhit	28.932.800
		3	27	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Uhit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Uhit	45.150.560
		3	27	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Realiasi Jasa penunjang Ususan pemerintah daerah	4 Kegiatan	67.902.640
		3	27	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.163.200
		3	27	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	44.129.280

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM ( <i>out come</i> ) KEGIATAN ( <i>out put</i> )	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN	
									2023	
									target (K)	(Rp.)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)
		3	27	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5.408.000
		3	27	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40 Laporan	16.202.160
		3	27	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah Asset pada Dinas Peternakan yang berfungsi Optimal	64 Unit	182.184.080
		3	27	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	86.700.640
		3	27	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	14.444.560
		3	27	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	81.037.840
		3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentasi rata - rata pertumbuhan populasi temak per Tahun	5 persen	17.794.102.560
		3	27	02	2,02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik Hewan yang dipelihara di Lontok Timur	10 jenis	16.695.581.760



TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM ( <i>out come</i> ) KEGIATAN ( <i>out put</i> )	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN	
									2023	
									target (K)	(Rp.)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)
		3	27	02	2,02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewar/Tanaman	Jumlah bibit temak yang terdistribusi kepada masyarakat	350 Uhit Temak	16.279.432.000
		3	27	02	2,02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewar/Tanaman	Jumlah kelahiran temak hasil Inseminasi Buatan (IB)	8.000 ekor	416.149.760
		3	27	02	2,03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Elbit Temak dan Tanaman Pakan Temak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peternak yang menggunakan Teknologi Peternakan Tepat Guna	14.000 peternak	<b>47.806.720</b>
		3	27	02	2,03	01	Pengawasan Mutu Benih/Elbit Temak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah inseminator dan PKB yang terlatih dan terampil	5 orang	47.806.720
		3	27	02	2,05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Elbit Temak, dan Hjauan Pakan Temak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyediaan pakan temak dan Registrasi temak	2 kegiatan	<b>1.050.714.080</b>
		3	27	02	2,05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Elbit Temak dan Hjauan Pakan Temak	Jumlah produksi HPT, bahan pakan/pakan temak	150 ton	1.020.937.840
		3	27	02	2,05	06	Pengawasan Produksi Benih/Elbit Temak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Persentase kenaikan populasi temak Besar, Kecil dan Uggas	5 persen	29.776.240
		3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana peternakan per tahun	15 Persen	<b>3.812.180.320</b>
		3	27	03	2,02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Peternakan yang terbangun	15 Uhit	<b>3.812.180.320</b>
		3	27	03	2,02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Prasarana dan Sarana RPH yang berfungsi optimal	6 unit	81.120.000
		3	27	03	2,02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Peningkatan Jumlah dan kualitas prasarana peternakan	12 unit	3.731.060.320

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM ( <i>out come</i> ) KEGIATAN ( <i>out put</i> )	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN	
									2023	
									target (K)	(Rp.)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)
		3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dari PHM	100 persen	1.495.740.480
		3	27	04	2,01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah penyakit hewan dan zoonosis pertahun	100 Persen	483.844.400
		3	27	04	2,01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah temak yang terobati dari serangan penyakit hewan dan zoonosis	15.000 ekor	483.844.400
		3	27	04	2,02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Intensitas pengawasan Pemasukan dan Pegeluaran temak	60 kali	83.052.320
		3	27	04	2,02	03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah temak yang diterbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) Lintas Kabupaten/Kota	14.000 ekor	83.052.320
		3	27	04	2,03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengambilan sampel per populasi	1 persen	6.381.440
		3	27	04	2,03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Sampel temak yang diuji	500 sampel	6.381.440
		3	27	04	2,03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah medik veteriner yang melakukan pelayanan	2 orang	0
		3	27	04	2,04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pelaku Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	50 Orang	808.147.600
		3	27	04	2,04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah peserta yang mengakses Kredit Usaha Peternakan dan AUTS	6.000 orang	773.784.960

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJATUJUAN SASARAN PROGRAM ( <i>out come</i> ) KEGIATAN ( <i>out put</i> )	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN	
									2023	
									target (K)	(Rp.)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)
		3	27	04	2,04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat Utuh dan Halal	100 persen	34.361.600
		3	27	04	2,05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah pemotongan ternak tercatat di RPH/TPH	14.000 ekor	<b>114.313.680</b>
		3	27	04	2,05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah jagal yang terampil dan terlatih di RPH/TPH	10 orang	114.313.680
		3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Ijin Usaha Hewan yang direkomendasikan untuk Registrasi dan penerbitan ijin baru	24 Uhit	<b>60.569.600</b>
		3	27	06	2,02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Elbit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Uhit Usaha Hewan yang legal	24 Uhit	<b>60.569.600</b>
		3	27	06	2,02	01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Elbit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Intensitas pengawasan berkala terhadap Usaha Pemotongan Hewan	24 kali	60.569.600
										31.055.025.040

#### **BAB IV. PENUTUP**

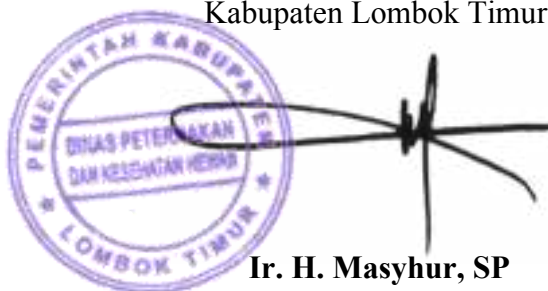
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur ini memuat tentang keadaan / kondisi umum daerah, isu strategis dan permasalahan, prioritas program pembangunan dan rencana kegiatan serta anggarannya pada Tahun 2023.

Renja SKPD ini disusun dalam rangka untuk meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas serta efisiensi dan efektivitas setiap pelaksanaan program dan kegiatannya yang bersumber dari pembiayaan APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023.

Dengan adanya Renja SKPD ini diharapkan dapat menjadi bahan tindak lanjut bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023, sehingga prioritas pembangunan dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Lombok Timur umumnya dan lebih khusus Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur

Selong, 15 Juni 2022

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Kabupaten Lombok Timur,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR". The inner circle contains the text "DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

**Ir. H. Masyhur, SP**  
**NIP. 19661231 199203 1 150**